

Judul : Kajian Penciptaan Good Governance Di Provinsi Riau
Tahun : 2008
Penulis : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau
Kategori : Kebijakan Publik

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi global telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan kualitas pelayanan publik. Tuntutan ini mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip good governance sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut di kabupaten/kota Provinsi Riau masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya koordinasi kelembagaan, ketidaktepatan penafsiran regulasi, keterbatasan sumber daya manusia aparatur, serta ketimpangan sosial ekonomi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi umum penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota Provinsi Riau dalam kerangka menuju good governance, mengidentifikasi karakteristik serta akses yang mendukung pencapaiannya, dan menyusun rekomendasi kebijakan strategis yang sesuai dengan kondisi lokal. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode Participation Rapid Appraisal (PRA) dan Focus Group Discussion (FGD) di tujuh kabupaten/kota terpilih, disertai analisis SWOT untuk merumuskan strategi penguatan tata kelola pemerintahan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat komitmen terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik, penerapan good governance di Riau masih belum optimal. Faktor penghambat utama meliputi lemahnya profesionalisme aparatur, ketidakstabilan kelembagaan birokrasi, serta kurangnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Di sisi lain, peluang penguatan tata kelola muncul melalui penerapan e-government, desentralisasi fiskal, dan pengembangan sektor ekonomi riil berbasis potensi lokal.

Kajian ini merekomendasikan restrukturisasi kelembagaan berbasis fungsi, peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan DPRD, serta pembentukan kebijakan publik yang pro-rakyat dan pro-swasta. Dengan demikian, pencapaian good governance di Provinsi Riau memerlukan kolaborasi sinergis antara tiga domain utama—pemerintah, swasta, dan masyarakat—disertai penguatan kebijakan anggaran yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah.